



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL
GRESIK KELAS IA**

Jl. Permata Selatan No.6, Kembangan, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61121
website : www.pn-gresik.go.id, e-mail : gresik.pn@gmail.com

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)
PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL
GRESIK KELAS IA
PERIODE TRIWULAN I (JANUARI-MARET) TAHUN 2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

I. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2025 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya. Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL
GRESIK KELAS IA**

Jl. Permata Selatan No.6, Kembangan, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61121
website : www.pn-gresik.go.id, e-mail : gresik.pn@gmail.com

II. TUJUAN

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme. Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

IV. RUANG LINGKUP

1. Memonitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi Periode Triwulan I Tahun 2026 di Lingkungan Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik;
2. Mengevaluasi Aspek Indeks Persepsi Anti Korupsi Periode Triwulan I Tahun 2026 dan apa saja tiga indikator terendah pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik;
3. Melakukan Tindak Lanjut dari Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Hasil Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi Periode Triwulan I Tahun 2026.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL
GRESIK KELAS IA**

Jl. Permata Selatan No.6, Kembangan, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61121
website : www.pn-gresik.go.id, e-mail : gresik.pn@gmail.com

**BAB II
PEMBAHASAN**

A. MONITORING TERHADAP SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Dalam hal Survey Indeks Persepsi Korupsi, Ketua Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA memonitoring terhadap :

1. Manipulasi Peraturan;
2. Penyalahgunaan Jabatan;
3. Menjual Pengaruh;
4. Transparansi Biaya;
5. Transaksi Rahasia;
6. Hadiah;
7. Tranparansi Pembayaran;
8. Percaloan;
9. KKN;
10. Perbuatan Curang.

B. EVALUASI TERHADAP SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada Periode Triwulan I bulan Januari-Maret Tahun 2026, pada Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik untuk Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang berada pada posisi 3 terendah antara lain:

1. Manipulasi Peraturan, mendapat indeks **3,967**;
2. Transaksi Rahasia Peraturan, dengan nilai **3,967**;
3. Transparansi Biaya, dengan nilai **3,974**;



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL
GRESIK KELAS IA**

Jl. Permata Selatan No.6, Kembangan, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61121
website : www.pn-gresik.go.id, e-mail : gresik.pn@gmail.com

**BAB III
PENUTUP**

A. KESIMPULAN

Pada dasarnya Ketua Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik telah melaksanakan tugas pengawasan dengan sangat baik, dimana dari hasil Pengawasannya tersebut terdapat 3 indikator terendah survei IPAK Periode Triwulan I Tahun 2026 yaitu :

1. Manipulasi Peraturan, mendapat indeks **3,967**;
2. Transaksi Rahasia, dengan nilai **3,967**;
3. Tranparansi Pembayaran, dengan nilai **3,974**;

B. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil 3 terendah tersebut diatas maka tidak lanjut yang harus dilakukan adalah :

1. Manipulasi Peraturan, mendapat indeks (3,967);

- a. Membuat standarisasi dan transparansi layanan.
- b. Setiap jenis layanan harus memiliki Standar Pelayanan yang jelas dan mudah diakses publik.
- c. Mengupayakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menjadi satu-satunya jalur layanan langsung dengan masyarakat untuk menghindari kontak informal.
- d. Semua area meja PTSP wajib dilengkapi CCTV dan penilaian layanan elektronik.

2. Transaksi Rahasia, dengan nilai (3,967);

- a. Melakukan publikasi informasi tentang biaya/tarif pada ruang PTSP, website serta media sosial.
- b. Memberi pengarahan kepada petugas PTSP serta seluruh pegawai agar memaparkan kepada setiap pengguna layanan mengenai biaya/tarif.

3. Transparansi Pembayaran, mendapat indeks (3,974):

- a. Senantiasa memberikan penegasan kepada seluruh petugas layanan untuk tidak meminta atau menerima pembayaran di luar tarif resmi dalam briefing PTSP.
- b. Jika terdapat temuan, pengadilan akan menindaklanjuti dengan pembinaan,



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL
GRESIK KELAS IA**

Jl. Permata Selatan No.6, Kembangan, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61121
website : www.pn-gresik.go.id, e-mail : gresik.pn@gmail.com

teguran, atau sanksi kepada petugas yang melanggar prosedur.

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Survei Persepsi Anti Korupsi Periode Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2026 di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik dibuat, semoga laporan ini dapat bermanfaat demi tertibnya administrasi pada pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas untuk terwujudnya Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Yang Agung.

Penanggung Jawab Survei

SYAWAL ASWAD SIREGAR, S.H., M.Hum.

Gresik, 8 April 2026

Koordinator Tim Survei

ZULVIKAR NUR BARLIAN, S.H.

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial
Kelas IA

ACHMAD RIFAI, S.H., M.H.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL
GRESIK KELAS IA**

Jl. Permata Selatan No.6, Kembangan, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61121
website : www.pn-gresik.go.id, e-mail : gresik.pn@gmail.com

**LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL MONITORING DAN EVALUASI ATAS
SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)
PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL
GRESIK KELAS IA
PERIODE TRIWULAN I (JANUARI-MARET) TAHUN 2026**

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada Survey Indeks Persepsi Korupsi pada Periode Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2026 pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, maka kami telah menindak lanjuti Hasil dari monitoring dan evaluasi, yaitu sebagai berikut:

1. Tindak Lanjut Manipulasi Peraturan, mendapat indeks (3,967);

- a. Membuat standarisasi dan transparansi layanan.
- b. Setiap jenis layanan harus memiliki Standar Pelayanan yang jelas dan mudah diakses publik.
- c. Mengupayakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menjadi satu-satunya jalur layanan langsung dengan masyarakat untuk menghindari kontak informal.
- d. Semua area meja PTSP wajib dilengkapi CCTV dan penilaian layanan elektronik.

2. Tindak Lanjut Transaksi Rahasia, dengan nilai (3,967);

- a. Melakukan publikasi informasi tentang biaya/tarif pada ruang PTSP, website serta media sosial.
- b. Memberi pengarahan kepada petugas PTSP serta seluruh pegawai agar memaparkan kepada setiap pengguna layanan mengenai biaya/tarif.

3. Tindak Lanjut Transparansi Pembayaran, mendapat indeks (3,974):

- a. Senantiasa memberikan penegasan kepada seluruh petugas layanan untuk tidak meminta atau menerima pembayaran di luar tarif resmi dalam briefing PTSP.
- b. Jika terdapat temuan, pengadilan akan menindaklanjuti dengan pembinaan, teguran, atau sanksi kepada petugas yang melanggar prosedur.

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Survei Persepsi Anti Korupsi Periode Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2026 di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik dibuat, semoga laporan ini dapat bermanfaat demi tertibnya administrasi pada



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL
GRESIK KELAS IA**

Jl. Permata Selatan No.6, Kembangan, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61121
website : www.pn-gresik.go.id, e-mail : gresik.pn@gmail.com

pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas untuk terwujudnya Pengadilan Negeri /
Hubungan Industrial Gresik Yang Agung.

Penanggung Jawab Survei

SYAWAL ASWAD SIREGAR, S.H., M.Hum.

Gresik, 8 April 2026

Koordinator Tim Survei

ZULVIKAR NUR BARLIAN, S.H.

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial
Kelas IA

ACHMAD RIFAI, S.H., M.H.